

# Problematika Pendidikan di Indonesia

Oleh:

Efrizal Nasution<sup>1</sup>

## Abstract

This paper reviews the problem of Education in Indonesia is seen from the dimensional of leadership and Education gaps. Increasingly complex education challenges, a long with a Community issue. In connection with the word of Education should be able to resolve the issue. This is certainly not to be separated from the role of the leader, because leaders are determinis the direction of a policy. Thus the government as Education providers are expected to address the Isa of allowing gap Education can help.

*Keywords: Dimensions of leadership, Educational Disparities.*

### A. Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka lebih dari 69 tahun. Cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan pergerakan nasional tersebut. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu *icon* penting kehidupan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya aktualisasi menuju masa depan yang baik. Perjalanan waktu yang cukup panjang wajar apabila bangsa ini mendapatkan pelajaran berharga yang akan menjadi modal dasar untuk menciptakan sejarah di masa depan yang lebih baik. Indonesia dahulu pernah dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Manusia secara fantastis. Bahkan, pada era 60-an banyak tenaga pengajar dari Indonesia diperbantukan untuk mengajar di negara tetangga, dan banyak juga mahasiswa dari

negara tetangga (Malaysia, contohnya) yang studi di Indonesia.<sup>2</sup>

Pendidikan merupakan usaha *etis* dari manusia, untuk manusia dan untuk masyarakat manusia. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang sampai pada tingkat optimal dalam batas hakikat individu, dengan tujuan supaya tiap manusia bisa secara terhormat ikut serta dalam pengembangan manusia dan masyarakatnya terus menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua manusia mengalami proses pendidikan. Pendidikan merupakan cahaya penerang yang menuntun manusia

---

<sup>2</sup> Musthofa Rembagy, *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis merumuskan pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 4

<sup>3</sup> Slamet Imam santoso, *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987), h. 98

---

<sup>1</sup> Dosen jurusan sosiologi pada Fakultas ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon

dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini.

Berbagai problematika pendidikan di Indonesia cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan baik itu di jajaran tingkat atas maupun tingkat bawah. Berbagai kasus keluhan-keluhan terjadi di lapangan, baik pimpinan sekolah maupun para pendidik yang menyanggah dimensi kepemimpinan seperti soal manajemen, disiplin, birokrasi dan administrasi yang amburadul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga soal kepemimpinan di sekolah turut berperan mewarnai wajah penyelenggaraan dunia pendidikan serta memperlebar kesenjangan dan konflik internal para pendidik.

Ditambah lagi dengan pemberlakuan otonomi daerah, di mana sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Yang menjadi persoalan adalah, setelah 69 tahun Indonesia merdeka, di mana rakyat memberikan hak sepenuhnya kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan kenegaraan dengan segala kebutuhan-kebutuhannya dan sejauh mana tanggung jawab moral pemerintah termasuk di dalamnya aparat pemimpin dengan jajarannya dalam mempersiapkan, menyediakan serta mengembangkan dunia pendidikan. Kondisi dinamis seperti ini tentu saja suatu dilematika yang cukup ironis, dan berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan. Memikirkan konsep

dan mekanisme pendidikan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan dengan kondisi masyarakat yang pluralis tentunya bukan perkara gampang. Tetapi walaupun demikian tetap merujuk bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>4</sup>

Di dalam masyarakat Indonesia dewasa ini muncul banyak kritik baik dari praktisi pendidikan maupun dari kalangan pengamat pendidikan nasional yang tidak mempunyai arah yang jelas. Ketiadaan arah yang tidak jelas dalam pendidikan nasional menunjukkan hilangnya *elan vital* di dalam pendidikan nasional yang menggerakkan sistem pendidikan untuk mewujudkan cita-cita bersama Indonesia raya.<sup>5</sup> Maka tulisan ini membahas tentang problematika pendidikan nasional yang dilihat dari dua hal yaitu: 1) Masalah kebijakan pendidikan yang terkait dengan dimensi kepemimpinan, 2) Masalah kesenjangan sarana prasarana dan pemerataan pendidikan.

## **B. Pengertian dan Fungsi Pendidikan**

Dalam arti yang sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (*UU RI Nomor 20 Tahun 2003*), Jakarta: Sinar Grafika, 2003), H. v

<sup>5</sup> H.A.R Tilaar. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 14

Menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Lebih jauh dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan adalah: a) usaha (kegiatan) usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, b) ada pendidik, pembimbing atau penolong, c) ada yang didik atau si terdidik, d) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan, e) dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang dipergunakan.<sup>6</sup>

Sementara dalam Undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>7</sup>

Fungsi pendidikan menurut Hasan Langgulung secara garis besar dibagi pada tiga. *Pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. *Ketiga*, memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara,

sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban.<sup>8</sup>

Sementara pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Dari paparan di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi pendidikan itu merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan itu harus berjalan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada transformasi pengetahuan serta nilai-nilai dan norma sosial dari generasi tua ke generasi muda.

### C. Problematika Pendidikan

#### • Dimensi Kepemimpinan

Dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, arah pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan penguasa, ketika penguasa memerlukan suatu kekuatan politik ke arah itulah pendidikan di arahkan.<sup>10</sup> Bangsa Indonesia, sejak merdeka hingga saat ini mengalami pergantian empat model

<sup>6</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 3

<sup>7</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (*UU RI Nomor 20 Tahun 2003*), Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.2

<sup>8</sup> [www.http://dbagus.com/pengertian-fungsi-pendidikan-menurut-para-ahli](http://dbagus.com/pengertian-fungsi-pendidikan-menurut-para-ahli)

<sup>9</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (*UU RI Nomor 20 Tahun 2003*), Op cit, h.5

<sup>10</sup> H.A.R Tilaar, *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 59

kepemimpinan, masing-masing adalah orde lama, orde baru, orde reformasi dan orde sekarang yang banyak pengamat atau pemerhati menyebutnya sebagai era transisi menuju demokrasi. Sedikit atau banyak, tentunya setiap orde memberikan kontribusi dan membantu menentukan corak pendidikan saat ini.<sup>11</sup>

Kalau ditilik lebih dalam aspek politik pendidikan. Pendidikan diorientasikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ideologi dan kepentingan politik untuk mempertahankan status quo. Misalkan pada masa orde baru pendidikan cenderung dijadikan sebagai alat kekuasaan sehingga menghilangkan esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Bahkan pendidikan dijadikan sebagai alat indoktrinasi kepada masyarakat. Sistem pendidikan pada masa orde baru, pelaksanaan pendidikan secara langsung dikendalikan oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang sangat panjang dari tingkat pusat sampai ke daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Kepemimpinan seperti ini tentunya berdampak pada dunia pendidikan, di mana pedoman dan dasar bertindak pendidik tidak lagi mengacu pada profesionalitas melainkan instruksi dari atasan. Kondisi seperti mengakibatkan keberpihakan pada atasan dan menghilangkan hak-hak dan kewenangan profesional. Alhasil pendidikan memproduksi manusia-manusia penurut, tidak berani mengambil Keputusan tidak ada kemandirian karena lebih banyak terpaksa dan keputus-putus.

Dewasa ini pendidikan nasional merupakan subordinasi dari kekuatan-

kekuatan politik praktis. Hal ini berarti pendidikan telah dimasukkan di dalam kancah perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan bukan lagi untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi untuk membangun kekuatan dari partai politik praktis tertentu untuk kepentingan golongan atau pun kelompoknya sendiri.<sup>12</sup> Yang lebih tragis ketika diberlakukannya otonomi daerah yang diiringi dengan otonomi pendidikan, banyak kepala daerah yang mengedepankan sisi subjektivitas dari pada objektivitas dalam menempatkan orang-orang yang profesional di bidang pendidikan. Hal ini berarti dimensi kepemimpinan di daerah juga mempengaruhi pendidikan di tingkat daerah.

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dalam kebijakan desentralisasi pendidikan, pemindahan Kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukanlah hal yang terpenting, yang penting adalah mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan adil. Maka dalam hal ini, perlu pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, dan masing-masing mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkannya. Sebab berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah paling tidak ditentukan tiga hal, yaitu (1) adanya *political will* dan *political commitment* dari pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah; (2) adanya iktikad baik dari

---

<sup>11</sup> Musthofa Rembangy . *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 20

---

<sup>12</sup> H.A.R Tilaar. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 14

pemerintah dalam membantu keuangan daerah; (3) adanya perubahan perilaku elit lokal untuk dapat membangun daerah.<sup>13</sup> Tuntutan perubahan ini pada prinsipnya untuk membangun komitmen bersama, termasuk adanya kemauan perubahan perilaku para elit lokal. Hal ini menjadi sangat penting sebab banyak yang mengkhawatirkan bahwa otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan kekuasaan sangat pada daerah tidak akan mengubah apa-apa.

Kemudian kalau kita lihat ketika terjadi pergantian menteri hampir selalu dibarengi dengan pergantian kurikulum. Orientasi kurikulum yang diterapkan pun dilandasi oleh *background* pendidikan sang menteri. Pergantian kurikulum tersebut memang tidak menjadi permasalahan, karena pergantian kurikulum diharapkan materi pelajaran akan lebih baik dan lebih bermuatan jawaban terhadap tantangan global. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kurikulum tersebut tidak diimbangi oleh porsi muatan humanisme. Pergantian kurikulum ini juga sebenarnya justru menambah beban tersendiri bagi orang tua dalam hal pembiayaan pendidikan. Karena otomatis jika pergantian kurikulum akan cenderung ganti buku, dan dengan sendirinya pengeluaran terhadap buku anak akan meningkat.

Tidak seorang pun yang dapat membantah pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan itu penting. Semuanya sependapat bahwa pendidikan menjadi alat yang amat penting untuk meningkatkan mutu kehidupan. Meski pendidikan penting bagi kehidupan tidak semua orang memiliki komitmen yang sama untuk memajukan

pendidikan, khususnya komitmen para pemimpin terhadap pentingnya pendidikan. Inti permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pemimpin bangsa terhadap pendidikan dan rendahnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan.<sup>14</sup>

Bangsa kita sudah yang ke tujuh kalinya melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang baru ini diharapkan akan lebih bisa memikirkan dan berpihak pada kemajuan pendidikan. Apalagi dengan kebijakan tentang terbentuknya kementerian pendidikan dasar dan menengah dan kementerian riset dan pendidikan tinggi membawa angin segar untuk perubahan dan kemajuan bangsa ini.

Kita tentunya berharap banyak terhadap pemimpin yang baru ini dapat melakukan transformasi pendidikan sehingga problematika di bidang pendidikan dapat terselesaikan paling tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. Apalagi kalau dicermati. Tuntutan dan tantangan dunia pendidikan kian hari terasa demikian kompleks, seiring dengan kompleksitasnya persoalan kemasyarakatan. Setumpuk tuntutan dan aspirasi masyarakat kian meninggi dan kompetitif tertuju pada lembaga pendidikan, dengan suatu harapan kehadiran pendidikan mampu mengatasi serta mengantisipasi berbagai problematika dan transformasi kehidupan yang semakin global. Sementara bagian lain, institusi pendidikan sendiri bergulat dalam menghadapi berbagai problem baik itu menyangkut sistem, konsepsi, mekanisme, maupun strategi implementasi.

---

<sup>13</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: rajagrafindo Persada, 2007), h. 41

---

<sup>14</sup> Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dari Konsepsi Sampai Dengan Implementasi*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2004), h. 148

Transformasi sosial yang amat cepat telah terjadi pada abad 21. Transformasi sosial tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan politik demikian juga perkembangan pendidikan juga akan ditentukan oleh sosok kepemimpinan dalam konteks pemerintah. Pemimpin itu mempunyai tugas yang amat berat, bukan hanya sekedar mencari kekuasaan, kedudukan, fasilitas, dan kekayaan. Maka sesayogianya pemimpin harus bisa menyelesaikan berbagai masalah bangsa dan membawanya menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pemimpin harus mempunyai jiwa pengabdian untuk bangsa dan negara.

Dalam proses transformasi sosial, transformasi pendidikan Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Ke mana arah dan bentuk transformasi pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan. Bangsa kita sudah yang ke tujuh kalinya melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Kita tentunya berharap banyak terhadap pemimpin yang baru ini dapat melakukan transformasi pendidikan sehingga problematika di bidang pendidikan dapat terselesaikan paling tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini.

- **Kesenjangan pendidikan**

Pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Asumsinya hal ini terjadi karena pemerintah kurang serius memperhatikan bidang pendidikan. Sementara kemajuan bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi di berbagai hal seperti: sarana prasarana dan sumber daya tenaga pendidik

#### a) **Sarana Prasarana**

Terdapat kesenjangan cukup besar terkait kualitas pendidikan antara sekolah yang di kota dan daerah terpencil. Pada umumnya sekolah yang berada di perkotaan lebih baik daripada sekolah di pedesaan. Sering kita lihat secara langsung maupun lewat pemberitaan di media televisi dan surat kabar kondisi sekolah di pedesaan dan daerah terpencil yang sangat tidak layak. Misalnya kondisi bangunan yang rapuh bahkan sudah mau roboh ditambah atap yang bocor sehingga kegiatan proses belajar mengajar sering terkandala. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat penting.

Banyaknya sarana pendidikan yang rusak dan tidak layak ini merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan. Dari 1,3 juta ruang kelas, 769 ribu dalam kondisi layak pakai (59%), 299 ribu rusak berat (23%) dan 242 ribu rusak ringan (18%). Pada tahun 2012 sudah 22 ribu ruang kelas yang diperbaiki.<sup>15</sup> Proyek perbaikan sekolah ini tidak akan pernah selesai. Sekolah yang sekarang masuk dalam kategori ringan akan naik menjadi rusak sedang, lalu rusak berat jika tidak ditangani tentunya akan menjadi rusak berat.

Kerusakan sarana pendidikan yang begitu parah ditambah dengan prasarana pendidikan yang tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerusakan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak maka proses

---

<sup>15</sup> Bambang Triatmodjo, *Menuju Kejayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2013), h. 141

pendidikan tidak dapat berlangsung secara efektif.

Umumnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dan daerah terpencil masih terkendala dengan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. Kalau pun mendapatkan bantuan seperti rehab ruangan kelas, tapi itu pun tidak seluruhnya. Prosesnya hanya bagian tertentu saja seperti atap dan pengecatan.

Kesenjangan yang lain juga pada jumlah dan ketersediaan buku yang,. Ketersediaan buku di daerah perkotaan dan dan daerah terpencil serta perbatasan terjadi kesenjangan baik dari segi jumlah ketersediaan dan kualitas buku. Sementara ketersediaan buku merupakan penunjang pendidikan yang sangat penting karena hal ini akan menunjang keberhasilan proses pendidikan.

Masalah sarana dan prasarana keterkaitannya tentunya dengan anggaran pendidikan. Menyangkut anggaran pendidikan merupakan saah satu faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Anggaran pendidikan ini akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran.

Pembenahan pendidikan dalam hal pemerataan sangat penting untuk mewujudkan kualitas pendidikan di semua daerah. Hal dapat diwujudkan salah satunya apabila didukung oleh dana yang cukup dan pengelolaan yang baik. Tentunya kita berharap banyak pada pemberlakuan otonomi pendidikan sebagai salah satu kebijakan pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah. Otonomi pendidikan diharapkan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih

mandiri, terbuka, demokratis dan maju masih jauh dari tercapai.<sup>16</sup>

## b) Tenaga Pendidik

kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, namun hal ini tidak dapat dipukul rata begitu saja Tetapi harus diakui bahwa jumlah guru yang sedikit salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru.

Jumlah guru yang kurang memadai ini banyak terjadi di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan, jumlah guru hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara itu, di daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya memada terjadi penumpukan guru. Bahkan dalam satu SD dijumpai 11-14 orang guru, termasuk diantaranya kepala sekolah.<sup>17</sup> Oleh karena itu, sampai saat ini sekolah yang maju di perkotaan dapat terus bertahan dengan kemajuannya, sementara sekolah yang kekurangan guru di pedesaan/daerah terpencil semakin terisolasi dan semakin terpuruk.

Posisi guru sangat vital dalam pendidikan. Dari segi kuantitas dan pemerataan guru mengalami persoalan yang dilematis, ada sekolah yang kelebihan guru tetapi ada juga sekolah yang kekurangan guru. Salah satu faktor i kesenjangan pemerataan guru di Indonesia karena kondisi geografis negara kita yang sangat luas.

Kesenjangan pemerataan tenaga pendidik ini merupakan pekerjaan yang

---

<sup>16</sup> Ahmad Fedyani Saifuddin, *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*, (Jakarta: All Rihgts Reserved, 2011), h. 40

<sup>17</sup> Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h.58

harus terselesaikan supaya pemerataan guru ini dapat terwujud. Berbagai upaya sudah dilakukan seperti penambahan guru melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), guru kontrak dan memberikan tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini tentunya tidak langsung menyelesaikan masalah.

Belum lagi berbicara mengenai kualitas guru. Seorang guru yang memiliki posisi strategi dalam usaha tercapainya kualitas pendidikan yang semakin baik amat dituntut kemampuan profesionalnya. Skill dan profesionalitas senantiasa harus ditingkatkan, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan dalam membangun pendidikan. Artinya harus ada pemerataan dan kualitas guru di Indonesia. Barangkali hal ini dapat diatasi dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Di samping itu, pemerintah baik pusat dan daerah harus membuat program yang bisa merangsang lagi guru-guru yang mau mengabdikan diri bagi daerah/daerah terpencil. Misalnya, ada semacam tunjangan khusus bagi guru yang mau mengabdikan diri bagi daerah/desa yang masuk kategori terpencil sehingga ada semacam ukuran *cost* dan *benefit* bagi guru dari sudut rasional dan tuntutan sosial.<sup>18</sup>

Mengenai kualitas guru, seharusnya juga menjadi prioritas yang diutamakan dalam rangka menyiapkan guru yang kompeten, memiliki skill/kemampuan yang

tinggi. Pemerintah diharapkan mengalokasikan dana bagi peningkatan kualitas guru, karena tidak bisa dipungkiri bahwa guru merupakan ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam undang-undang guru dan dosen Bab V Pasal 10 yang berbunyi: kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>19</sup>

Masalah kompetensi guru adalah masalah serius, untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara baik, selain itu juga tentunya guru terus belajar untuk mengembangkan wawasan dan intelektualitas yang pada gilirannya bisa membangun kreativitas guru.

#### **D. Tantangan dan Prospek Pendidikan Indonesia**

Pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional, kerennanya peranan kepemimpinan dalam dunia pendidikan sangat penting dalam membuat arah dan implementasi kebijakan pendidikan. Memang harus diakui bahwa masalah pendidikan termasuk masalah yang paling sulit untuk ditangani. Berbagai macam kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang menyimpang dari ketetapan. Meskipun demikian usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan tersebut perlu dihargai.

Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh bangsa Indonesia, khususnya pemerintah bagaimana

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 62

---

<sup>19</sup> Abd Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, (Yogyakarta: graha Guru, 2011), h. 99



menjadikan negara dengan jumlah penduduk yang besar dalam mutu sumber daya manusianya. Dengan demikian tantangan terbesar dari bangsa ini adalah tentang rendahnya mutu pendidikan. Bangsa ini mau tidak mau harus melakukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai sektor yang berkaitan dengan pendidikan

Transformasi pendidikan Indonesia merupakan keniscayaan. Kemana arah dan transformasi pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan yang muncul. Era reformasi yang dimulai sejak 1998 merupakan era transisi yang salah satunya memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Undang-undang ini telah memberikan ruang terhadap perubahan-perubahan yang salah satunya adalah desentralisasi pendidikan. Perubahan ini tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah baik pusat dan daerah bagaimana persoalan wewenang tidak terjadi tumpang tindik atau bahkan menjadi sumber permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kemudian seiring dengan era globalisasi, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia dituntut untuk meningkatkan mutu sumber daya manusianya dalam menghadapi persaingan global. Dunia pendidikan harus peka dan tanggap dalam mempersiapkan sistem pendidikan sesuai dengan konteks dan tuntutan zaman.

Tentang prospek pendidikan nasional ke depan dalam menghadapi era perkembangan globalisasi, kesadaran

global tentang peningkatan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan bagi dunia pendidikan. Hal ini karena pendidikan sebagai bentuk investasi dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Mudah-mudahan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pendidikan dalam rangka reformasi pendidikan nasional ke arah yang lebih baik.

## **E. Penutup**

### **• Kesimpulan**

Pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa, karena dengan pendidikan akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Tentu saja bangsa Indonesia tidak mau hidup terbelakang akibat aspek pendidikan tidak mendapat porsi yang cukup dengan teringinya berbagai kemajuan di bidang lain.

Hal yang mendasar bagi pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh dimensi kepemimpinan atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan pada gilirannya untuk memberdayakan dan membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemimpin harus merata ke setiap daerah sehingga kesenjangan tidak lagi terjadi. Namun kita harus menyadari masalah pembangunan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chan, Sam M., Sam, Tuti T. 2011 *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* Jakarta: Rajawali Press
- Getteng, Abd Rahman. 2011. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Yogyakarta: Graha Guru
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan: kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- . *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Rembagy, Musthofa. 2008. *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis merumuskan pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras
- *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2011. *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: All Rihgts Reserved
- Santoso, Slamet Imam. *Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Suparlan. 2004. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dari Konsepsi Sampai Dengan Impementasi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Tilaar, H.A.R. 2006. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta
- 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Balai Pustaka
- 2006. *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (*UU RI Nomor 20 Tahun 2003*), 2003. Jakarta: Sinar Grafika
- 2003. Jakarta: Sinar Grafika
- 2003 Jakarta: Sinar Grafika
- Triatmodjo, Bambang. 2013. *Menuju Kejayaan Indonesia*. Yogyakarta: Beta Offset
- [www.http://dbagus.com/pengertian-fungsi-pendidikan-menurut-para-ahli](http://dbagus.com/pengertian-fungsi-pendidikan-menurut-para-ahli)